

Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana ke 47
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban)
Jl. Bonang 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870, telp. 021-3913473

No. : 21/Surat Terbuka_JSJK/07

Hal : **Harapan Keadilan Tahun 2008 & Keteguhan Memperjuangkan HAM**

Kepada YTH

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

di-

Tempat

Dengan Hormat,

“Selamat tahun baru 2008 semoga membawa perubahan yang lebih baik”.

Kami segenap keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK) kembali berdiri diam di depan istana untuk yang ke 47 (empat puluh tujuh) kali. Satu tahun sudah kami menggelar aksi diam kamisan ini, sebagai bentuk tuntutan kami korban pelanggaran HAM yang terus diabaikan oleh Negara. Sampai saat ini, tak ada satupun respon yang Bapak Presiden berikan terhadap tuntutan kami. Bahkan permohonan audiensi kami *pun* sampai saat ini tak juga dipenuhi.

Reformasi telah bergulir sembilan tahun lebih, namun sekian banyak pekerjaan rumah yang terkait dengan penegakan HAM dan penuntasan Kasus Pelanggaran HAM terus digantungkan dan diabaikan; Tragedi 1965, peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Penculikan 1997/1998, Tragedi Mei 98, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Alas Tlogo hingga pembunuhan Munir dll. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum serius menjalankan agenda reformasi, khususnya di bidang penegakkan HAM.

Ratifikasi terhadap beberapa kovenan Internasional tentang HAM, menjadi anggota dewan HAM PBB, kedatangan pelapor khusus PBB, dan keterlibatan Indonesia dalam *Universal Periodic Report (UPR)* dll. Hanya mencerminkan politik pencitraan, karena sebatas “mempermanis” wajah HAM Indonesia di mata dunia Internasional. Sebab pada kenyataanya, sampai saat ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran berat HAM berat di dalam negeri yang terkesan sengaja diabaikan untuk dilupakan. Dan untuk sekian kali kami mempertanyakan mengapa Bapak Presiden masih dan terus diam??

Memasuki tahun 2008, sudah seharusnya penuntasan kasus pelanggaran HAM menjadi tindakan nyata di ahir-ahir masa jabatan Bapak Presiden. Untuk itu kami menyampaikan dan mengingatkan kepada bapak Presiden untuk;

1. Tuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM (tragedi 1965, peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Mei 98, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Alas Tlogo, Pembunuhan Munir dll).
2. Menciptakan terobosan kebijakan yang berpihak pada korban demi solusi kebuntuan yang ada. Sebab semakin berlarutnya penyelesaian kasus-kasus ini, akan semakin menambah penderitaan para keluarga korban.
3. Penuhi hak-hak korban (Reparasi) yang terampas akibat pelanggaran HAM yang dialami.

Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian dan prioritas demi terciptanya harkat kemanusiaan yang lebih baik.

Jakarta, 3 Januari 2007

Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK)

Suciwati

Sumarsih

Bejo Untung